

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki keragaman budaya, suku, ras, adat, dan agama. Keberagaman ini merupakan salah satu karakteristik unik yang membedakan Indonesia dari negara-negara lain di seluruh dunia. Dengan lebih dari 300 suku dan berbagai tradisi yang berbeda, Indonesia menciptakan mozaik sosial yang unik. Di tengah keragaman tersebut, mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam, dengan data menunjukkan bahwa sekitar 87,2% penduduknya memeluk agama Islam. Hal ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama terbesar di Indonesia, yang berpengaruh signifikan terhadap dinamika sosial, politik, dan budaya di tanah air. Pengaruh ini juga terlihat dalam cara masyarakat berinteraksi dan berpartisipasi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam proses politik¹.

Dalam konteks demokrasi, rakyat memiliki kekuasaan tertinggi dalam sistem pemerintahan yang dianut Indonesia². Demokrasi di Indonesia diimplementasikan melalui pemilihan umum (pemilu), di mana rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpin mereka secara langsung. Proses pemilu ini tidak hanya menjadi sarana untuk menentukan pemimpin, tetapi juga mencerminkan aspirasi dan harapan masyarakat, termasuk aspirasi dari mayoritas pemilih yang

¹ Kemenag, "Menjadi Muslim, Menjadi Indonesia (Kilas Balik Indonesia Menjadi Bangsa Muslim Terbesar)," <https://kemenag.go.id>, n.d., <https://kemenag.go.id/opini/menjadi-muslim-menjadi-indonesia-kilas-balik-indonesia-menjadi-bangsa-muslim-terbesar-03w0yt>

² Fathur Rahman Suryadi et al., "Mengupas Sistem Demokrasi Indonesia, Keunikan Dan Perbandingan Global," *Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora* 3, no. 3 (2024): Hlm. 32–39.

beragama Islam. Dengan demikian, pemilu menjadi momen penting bagi setiap calon legislatif dan eksekutif untuk meraih dukungan dari pemilih, yang mana pemahaman dan nilai-nilai Islam sering kali mempengaruhi pilihan politik mereka. Hal ini menunjukkan bahwa keragaman budaya dan agama di Indonesia tidak hanya memperkaya kehidupan sosial, tetapi juga membentuk dinamika politik yang kompleks dan menarik. Dalam konteks ini, pemahaman terhadap karakteristik pemilih menjadi sangat penting bagi para calon untuk merumuskan strategi yang tepat.

Para caleg yang sadar akan mayoritas pemilih di Indonesia adalah pemeluk agama Islam, mereka berupaya keras untuk merumuskan strategi yang efektif guna menarik perhatian dan mendapatkan suara dari komunitas Muslim. Berbagai pendekatan, mulai dari kampanye berbasis agama hingga penguatan hubungan dengan tokoh-tokoh agama, menjadi bagian dari strategi politik mereka. Dalam konteks ini, pemahaman terhadap preferensi pemilih Muslim dan bagaimana organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama (NU) dalam mempengaruhi dinamika politik lokal.

Nahdlatul Ulama (NU) adalah organisasi keagamaan yang didirikan pada 31 Januari 1926 di Kertopaten Surabaya oleh K.H.M. Hasyim Asya'ri dan K.H. Abdul Wahab Hasbullah, lahir sebagai respons terhadap kekhawatiran akan gerakan Islam modernis yang berpotensi mengikis identitas kultural dan paham keagamaan Ahlussunnah wal Jama'ah yang telah ada selama ratusan tahun³. Sebagai organisasi

³ NUONLINE, "Sejarah Singkat Berdirinya Nahdlatul Ulama," NUONLINE, n.d., <https://www.nu.or.id/fragmen/sejarah-singkat-berdirinya-nahdlatul-ulama-VpzA0>. Di akses 19 maret 2025

yang bergerak di bidang pendidikan, dakwah, dan sosial keagamaan, NU berperan penting dalam menjaga tradisi dan nilai-nilai Islam yang berhaluan Ahlul-sunnah wal Jama'ah.

Dengan tokoh kiai sebagai pusatnya, NU menjadi simbol kekuatan komunitas yang berbasis pada tradisi pondok pesantren dan adat setempat. Dalam mukadimah Khittah NU, tujuan pendirian organisasi ini adalah sebagai wadah bagi para ulama dan pengikutnya untuk memelihara, melestarikan, dan mengamalkan ajaran Islam, serta menciptakan kemaslahatan masyarakat dan memajukan bangsa. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam tentang NU dan pengaruhnya dalam masyarakat menjadi kunci bagi para calon untuk meraih dukungan yang signifikan dalam pemilu. Keterlibatan Nahdlatul Ulama (NU) dalam politik dimulai dengan pembentukan Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI) bersama Muhammadiyah pada 21 September 1937, yang mengubah pandangan para pemimpin NU terhadap isu-isu keagamaan dan politik.

Pada tahun 1945, NU aktif dalam Kongres Umat Islam di Yogyakarta dan ikut mendirikan Partai Islam Indonesia yang dikenal sebagai Majelis Syuro Muslimin (Mayumi). Namun, tujuh tahun kemudian, NU memutuskan untuk mundur dari Mayumi akibat konflik internal dan menyatakan diri sebagai salah satu kekuatan sosial politik di Indonesia. Keputusan ini berkontribusi pada banyaknya tokoh NU yang terlibat dalam dunia politik hingga saat ini, yang semakin memperkuat posisi NU

sebagai kekuatan yang berpengaruh dalam membentuk arah kebijakan dan dinamika sosial di Indonesia⁴.

Dalam konteks politik lokal, terutama di daerah-daerah dengan basis keislaman yang kental, kehadiran NU dapat berfungsi sebagai instrumen mobilisasi massa. Kedekatan dengan tokoh-tokoh NU, partisipasi dalam kegiatan sosial-keagamaan, dan simbol-simbol kultural yang melekat pada NU sering dimanfaatkan oleh kandidat politik untuk menarik simpati masyarakat. Fenomena ini menunjukkan adanya apa yang dikenal sebagai *cotail effect*, yaitu efek limpahan dukungan yang berasal dari tokoh atau institusi sosial yang dipercaya masyarakat terhadap kandidat yang memiliki kedekatan dengannya.

NU dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memiliki kedekatan dalam politik sangat erat, karena PKB didirikan sebagai representasi aspirasi jamaah NU. NU berperan penting dalam mendukung PKB, terutama dalam pemilu, dan keduanya berbagi nilai-nilai yang sama dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat. dalam ranah politik dapat dilihat sebagai sinergi yang saling menguntungkan. NU, sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia, memiliki pengaruh yang signifikan dalam membentuk opini publik dan mobilisasi massa, sementara PKB berfungsi sebagai saluran politik untuk mewujudkan aspirasi dan nilai-nilai yang dianut oleh para anggotanya.

⁴ Redaksi Nubatang, "Sejarah NU (4): Kilas NU Dan Politik," nubatang, n.d., nubatang.or.id/2024/09/17/sejarah-nu-4-kilas-nu-dan-politik/ . Di akses 19 maret 2025

Dalam banyak kesempatan, NU memberikan dukungan moral dan legitimasi kepada PKB, yang pada gilirannya berusaha untuk mengangkat isu-isu yang relevan bagi masyarakat, seperti pendidikan, kesejahteraan, dan keadilan sosial. Hubungan ini menciptakan sebuah ekosistem politik yang saling mendukung, di mana NU dan PKB berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama dalam pembangunan bangsa⁵. Sejalan dengan itu, Nahdlatul Ulama (NU) di Jambi resmi didirikan pada tahun 1939 di bawah kepemimpinan K.H. Kemas Abdussomad, dan sejak saat itu, organisasi ini sering terlibat dalam politik, termasuk dalam pemilihan legislatif dan pemilihan kepala daerah.

Para pengurus wilayah NU (PWNU) Provinsi Jambi, bersama dengan para kiai NU, secara aktif mendukung dan berpartisipasi dalam kampanye calon tertentu. Keterlibatan NU dalam politik sangat terlihat di Provinsi Jambi, di mana peran NU, baik secara langsung maupun tidak langsung, berkontribusi pada keberhasilan kepemimpinan kepala daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, serta dalam perebutan posisi strategis di pemerintahan. Banyak tokoh NU di Provinsi Jambi yang berhasil menduduki jabatan penting dalam sistem pemerintahan, seperti Abdullah Sani, yang merupakan anggota PWNU dan terpilih sebagai Wakil Gubernur Provinsi Jambi untuk periode 2021-2024. Dengan demikian, keterlibatan NU di Jambi mencerminkan komitmen mereka dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat dan mendukung pembangunan daerah melalui jalur politik.

⁵ M Amin Mubarak, Skripsi: *"Hubungan Nu Dengan Partai Kebangkitan Bangsa Dalam Perspektif Siyasah"* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2006), HAL. 45

Sama halnya dengan pemilihan kepala daerah di Provinsi Jambi, Nahdlatul Ulama (NU) tetap menjadi organisasi keagamaan terbesar di Kabupaten Muaro Jambi, sehingga pengaruhnya signifikan dalam berbagai proses pemilihan di wilayah tersebut. Salah satunya terlihat pada pemilihan legislatif (DPRD) Kabupaten Muaro Jambi, di mana banyak calon legislatif (caleg) mengusung tema keagamaan sebagai identitas utama dalam kampanye untuk menarik simpati masyarakat yang mayoritas Muslim. Tidak hanya itu, NU juga kerap menjadi sasaran para caleg untuk memperoleh dukungan (*endorsement*) baik dari organisasi maupun tokoh-tokoh NU sebagai upaya memperkuat legitimasi guna meraih kemenangan.

Berdasarkan temuan di lapangan, berbagai calon legislatif di Kabupaten Muaro Jambi memanfaatkan kegiatan sosial-keagamaan yang digelar NU, seperti pengajian, peringatan hari besar Islam, hingga kegiatan sosial kemasyarakatan sebagai ruang untuk menunjukkan kedekatan mereka dengan organisasi ini. Kehadiran dalam kegiatan tersebut tidak sekadar bersifat seremonial, tetapi juga menjadi upaya strategis dalam memperkuat relasi simbolik yang dibangun di atas rasa kebersamaan dan perjuangan ideologis. Dengan demikian, politik dan agama berinteraksi secara dinamis melalui wadah organisasi keagamaan.

Selain itu, pemanfaatan jaringan sosial NU yang luas juga menjadi faktor penting dalam penyebaran informasi politik. Jaringan tersebut tidak hanya terbatas pada struktur formal organisasi, tetapi juga melalui tokoh-tokoh agama, guru ngaji, pengurus majelis taklim, hingga komunitas santri. Jaringan sosial ini memungkinkan informasi politik dan dukungan terhadap calon legislatif dapat tersebar dengan cepat dan efektif

di berbagai lapisan masyarakat. Strategi ini membuktikan bahwa kekuatan jaringan sosial berbasis keagamaan mampu memperkuat basis elektoral kandidat.

Di sisi lain, fenomena afiliasi politik terhadap NU ini menimbulkan dinamika yang menarik. NU secara kelembagaan sering kali menegaskan posisinya sebagai organisasi keagamaan yang independen dan tidak berpihak pada partai politik tertentu. Namun, secara kultural dan personal, banyak tokoh maupun warga NU yang memiliki kedekatan dengan kandidat tertentu. Hal inilah yang kemudian menjadi ruang politik yang dimanfaatkan oleh calon legislatif untuk membangun kedekatan dengan basis massa NU tanpa harus menyeret organisasi ini secara struktural ke dalam politik praktis.

Sementara itu, Dapil Muaro Jambi 3 yang terdiri dari Kecamatan Sungai Gelam mendapat alokasi 7 kursi. Dapil Muaro Jambi 4 yang mencakup Kecamatan Mestong, Sungai Bahar, Bahar Utara, dan Bahar Selatan memperoleh alokasi tertinggi, yaitu 10 kursi. Terakhir, Dapil Muaro Jambi 5 yang meliputi Kecamatan Jambi Luar Kota mendapatkan alokasi sebanyak 7 kursi. Dari seluruh proses pemilu tersebut, terpilih 40 anggota DPRD Kabupaten Muaro Jambi yang akan menjabat untuk periode 2024–2029 sebagai representasi dari masing-masing dapil. Dari hasil pemilu tersebut, terpilih anggota DPRD Kabupaten Muaro Jambi sebagai berikut.

Tabel. 1
Daftar Anggota Legislatif Terpilih Kabupaten Muaro Jambi
Pada Pileg Tahun 2024

No	Nama Caleg	Partai	Dapil	Jabatan	Suara
1	Aidi Hatta	PAN	3	Ketua DPRD	2.020
2	M.Wiranto	PPP	1	Wakil I	2.818
3	Jurjani	PKB	1	Wakil II	2.137
4	Robinson Sirait	PAN	4	Anggota	4.197
5	Ulil Amri	PAN	5	Anggota	4.062
6	Lukman	PAN	2	Anggota	3.841
7	Jonaidi P. Nainggolan	PAN	2	Anggota	3.591
8	Mohamad Taufiq	PPP	4	Anggota	1.837
9	Indra Gunawan	PPP	2	Anggota	2.478
10	Robi Ramadhan	PPP	3	Anggota	1.479
11	Masito	PPP	5	Anggota	969
12	Ahmad Haikal	PKB	4	Anggota	3.750
13	Elvin Jonnedy	PKB	2	Anggota	2.690
14	Maryadi	PKB	3	Anggota	3.447
15	Sulaini S	PKB	5	Anggota	2.272
16	Edison	Golkar	1	Anggota	2.460
17	Muhammad Ridho	Golkar	5	Anggota	1.578
18	Sartono	Golkar	4	Anggota	1.361
19	H. Asikin	Golkar	2	Anggota	3.582
20	Andi Fitra Eka S	Golkar	3	Anggota	2.533
21	Ade Erma Suryani	Gerindra	2	Anggota	2.752
22	Kasnadi	Gerindra	4	Anggota	3.279
23	Hasanuddin Lubis	Gerindra	1	Anggota	4.580
24	Melawati	Gerindra	5	Anggota	202
25	H. Junaidi	Demokrat	2	Anggota	4.868
26	Siti Maimunah	Demokrat	4	Anggota	2.718
27	Sugito	Demokrat	3	Anggota	3.466
28	Ade Asmara	Demokrat	1	Anggota	2.589
29	Ahmad Murni	Nasdem	1	Anggota	2.872
30	H. Sulaiman	Nasdem	4	Anggota	2.723
31	Bustomi	Nasdem	2	Anggota	3.538
32	Ambo Tuo	Nasdem	3	Anggota	2.629

33	Yuli Setia Bakti	PDI-P	4	Anggota	4.906
34	Ahmad Sofian	PDI-P	4	Anggota	2.513
35	H. Usman Halik	PDI-P	2	Anggota	2.799
36	Faatumbu Duha	PDI-P	5	Anggota	3.025
37	M. Ali Mustika	PKS	3	Anggota	2.587
38	Syafri Hasibuan	PKS	5	Anggota	896
39	M. Ramadhan Mahir	Perindo	1	Anggota	2.385
40	Aulia Nofridianti	Perindo	4	Anggota	1.129

Sumber: KPU Kabupaten Muaro Jambi, 2025

Dari 40 nama anggota DPRD yang telah disebutkan, terdapat 16 orang di antaranya yang terafiliasi dengan Nahdlatul Ulama (NU). Ataupun yang terdata sebagai warga nahdliyin, yang peneliti konfirmasi melalui Pengurus Cabang NU Muaro Jambi. Adapun nama-nama anggota DPRD yang memiliki keterkaitan dengan NU tersebut antara lain sebagai berikut:

Tabel. 2
Daftar Caleg Terpilih Yang Terafiliasi Sebagai Warga Nahdlatul Ulama
Kabupaten Muaro Jambi

No	Nama Caleg	Partai	Dapil	Jabatan	Suara
1	M. Wiranto	PPP	1	Wakil I	2.818
2	Jurjani	PKB	1	Wakil II	2.137
3	Mohamad Taufiq	PPP	4	Anggota	1.837
4	Indra Gunawan	PPP	2	Anggota	2.478
5	Robi Ramadhan	PPP	3	Anggota	1.479
6	Masito	PPP	5	Anggota	969
7	Ahmad Haikal	PKB	4	Anggota	3.750
8	Elvin Jonnedy	PKB	2	Anggota	2.690
9	Maryadi	PKB	3	Anggota	3.447
10	Sulaini S	PKB	5	Anggota	2.272
11	Sartono	Golkar	4	Anggota	1.361
12	H. Asikin	Golkar	2	Anggota	3.582
13	Kasnadi	Gerindra	4	Anggota	3.279
14	Siti Maimunah	Demokrat	4	Anggota	2.718
15	Sugito	Demokrat	3	Anggota	3.466
16	H. Sulaiman	Nasdem	4	Anggota	2.723

Sumber: Data Hasil Penelitian, 2025

Dari total 40 anggota DPRD, Teridentifikasi sebanyak 16 kursi diduduki oleh anggota yang memiliki latar belakang Nahdlatul Ulama (NU), yang berarti 40% dari total anggota DPRD berasal dari NU. Hal ini bukanlah suatu kebetulan, melainkan mencerminkan kuatnya pengaruh NU di Provinsi Jambi, termasuk di Kabupaten Muaro Jambi. Sebagai organisasi Islam dengan basis massa yang luas dan tersebar di seluruh penjuru provinsi, NU memiliki peran strategis dalam memberikan dukungan kepada calon yang mereka dukung, baik secara langsung melalui instruksi dan rekomendasi, maupun secara tidak langsung melalui jaringan sosial dan keagamaan yang telah lama terbentuk di tengah masyarakat.

Para anggota legislatif yang memiliki latar belakang ke-NU-an tentunya memiliki jejaring dan relasi yang kuat serta luas. Hal ini disebabkan oleh organisasi NU yang memiliki basis massa keanggotaan yang besar di kabupaten ini. Dengan kondisi tersebut, tidak sulit bagi mereka untuk memperkenalkan diri ketika mencalonkan diri kepada masyarakat. Para calon legislatif kemudian memanfaatkan jejaring dan relasi yang mereka dapatkan sebagai kader NU untuk mencapai tujuan politiknya, dengan menggunakan organisasi serta para tokoh-tokoh di dalamnya.

Kedekatan para calon legislatif dengan NU tidak hanya dimanfaatkan saat proses pencalonan, tetapi juga menjadi strategi politik yang berkelanjutan. Para caleg ini menjalin komunikasi intensif dengan tokoh-tokoh NU dan memanfaatkan setiap momentum keagamaan sebagai ajang konsolidasi politik. Dengan cara ini, mereka tidak hanya memperkuat posisi politiknya, tetapi juga semakin mengukuhkan peran NU sebagai salah satu kekuatan penting dalam peta politik di Kabupaten Muaro Jambi.

Selain itu, faktor agama, khususnya ajaran NU, berperan signifikan dalam membentuk sikap dan perilaku politik, baik dari kalangan kader maupun para jamaah NU di Muaro Jambi. Nilai-nilai Ahlussunnah wal Jamaah (Aswaja) NU, seperti tawassuth (moderat), tawazun (seimbang), dan tasamuh (toleran), ditanamkan melalui pendidikan, pengajian, dan kegiatan keagamaan lainnya. Prinsip-prinsip ini secara situasi sosial-politik. NU mendorong para pemilih untuk memilih calon legislatif yang mampu membawa nilai-nilai tersebut ke dalam praktik politik, sehingga tercipta sinergi

antara ajaran agama dan kehidupan politik yang harmonis di tengah masyarakat Muaro Jambi⁶.

Melalui fenomena ini, dapat dilihat bahwa afiliasi politik calon legislatif terhadap NU di Kabupaten Muaro Jambi bukan hanya sekadar strategi jangka pendek untuk memperoleh suara, melainkan juga mencerminkan bagaimana politik lokal beroperasi dengan memanfaatkan identitas sosial-keagamaan masyarakat. Relasi simbolik, jaringan sosial, serta kontribusi dalam kegiatan keagamaan menjadi modal politik yang diperhitungkan. Dengan kata lain, strategi ini menunjukkan bagaimana politik lokal masih berakar kuat pada hubungan kultural dan religius yang telah lama mengakar di masyarakat.⁷

Secara keseluruhan, dari hal tersebut, para calon legislatif (caleg) memiliki peluang besar untuk dapat menduduki kursi-kursi DPRD, sebab latar belakang mereka sebagai kader NU dan kedekatan relasi dengan para tokoh-tokoh NU menjadi modal penting dalam memobilisasi massa. Hubungan yang terjalin erat antara caleg dan tokoh NU, seperti kiai, ulama, serta pengasuh pondok pesantren, mampu membangun kepercayaan di tengah masyarakat dan mendorong dukungan secara kolektif. Melalui jejaring sosial dan keagamaan yang telah lama terbentuk, para tokoh NU secara langsung maupun tidak langsung ikut mengarahkan pilihan politik jamaahnya,

⁶ Abd Latif, Ubaidillah, and Mundir, "Embedding Aswaja Values in Strengthening Religious Moderation in Students," *Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 4, no. 3 (2023): 601.

⁷ Abdul Haris and Abdulloh Dardum, "Kiai Nu Dan Politik (Keterlibatan Kiai Nu Jember Dalam Kontestasi Pilpres 2019)," *Fenomena* 20, no. 1 (2021): 91–114, <https://doi.org/10.35719/fenomena.v20i1.51>

sehingga memperbesar peluang para caleg yang berafiliasi dengan NU untuk memperoleh suara signifikan dan memenangkan kontestasi politik di tingkat daerah.

Situasi ini sering kali memunculkan pertanyaan terkait netralitas NU dalam ranah politik. Meskipun menghadapi tantangan dalam menjaga jarak dari politisasi agama, NU tetap memiliki peluang besar untuk berperan sebagai kekuatan moderat yang mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan agama dan politik. Peran tersebut diharapkan dapat mendorong terciptanya proses pemilihan yang lebih demokratis, etis, dan inklusif. Beberapa penelitian sebelumnya digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini, sebagai berikut.

Penelitian Tiara Widyani yang berjudul “Peran Nahdlatul Ulama dalam Keterpilihan Sofyan Ali sebagai Anggota DPR RI Periode 2019-2024” menggunakan metode kualitatif⁸. Dan menunjukkan bahwa posisi Sofyan Ali sebagai Ketua Dewan Pengurus Wilayah PKB serta keterkaitannya dengan Nahdlatul Ulama memiliki daya tarik signifikan. Hal ini memungkinkannya menarik simpati masyarakat, khususnya kalangan NU, sehingga mendukungnya dalam Pemilu 2019. Kajian ini juga bertujuan untuk mengamati peran NU terhadap kemenangan anggota legislatif dalam pemilihan umum, dengan perbedaan utama terletak pada fokus penelitian; jika Tiara Widyani meneliti peran NU dalam kemenangan anggota DPR RI, maka penelitian ini berfokus pada kemenangan anggota DPRD serta proses mobilisasi NU dalam ranah politik.

⁸ Widiyani, T. (2023). *Peran Nahdlatul Ulama Dalam Keterpilihan Sofyan Ali Sebagai Anggota Dpr Ri Periode 2019-2024* (Bachelor Thesis, Ilmu Politik).

Penelitian kualitatif oleh Nurdyansyah yang berjudul “ Komunikasi Politik Patronase NU dalam Pilkada Kabupaten Purbalingga 2020”⁹. Menunjukkan bahwa tokoh-tokoh NU memiliki peran penting dalam pemilihan kandidat, di mana kualitas mereka dalam masyarakat dan politik sangat memengaruhi kandidat yang diusung oleh PKB pada Pilkada Purbalingga 2020. Penelitian ini menekankan pentingnya peran tokoh NU dalam memengaruhi pilihan politik masyarakat melalui komunikasi politik yang terstruktur. Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada tujuan untuk memahami peran NU dalam politik namun perbedaannya terletak pada fokusnya; jika Nurdyansyah meneliti komunikasi politik dalam Pilkada, penelitian ini melihat peran NU secara lebih luas, tidak hanya dalam komunikasi politik, tetapi juga dalam dukungan terhadap kemenangan calon legislatif.

Penelitian Nur Nuzula yang berjudul “Politik Elit Nahdlatul Ulama (NU): Pemihakan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) Tahun 2014”¹⁰. Penelitian ini membahas secara mendalam sikap dan tindakan para elite NU dalam menentukan dukungan terhadap salah satu calon presiden serta faktor-faktor yang memengaruhi keputusan tersebut. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan studi tentang Pilkada Muaro Jambi 2024, yakni sama-sama melibatkan organisasi NU dan dinamika politiknya. Keduanya meneliti keterlibatan NU atau elite NU dalam proses politik, baik

⁹ Muhammad Nurdyansyah, “Komunikasi Politik Patronase NU Dalam Pilkada Kabupaten Purbalingga 2020,” *Dialektika Komunika: Jurnal Kajian Komunikasi Dan Pembangunan Daerah* 9, no. 2 (2021): 85–95, <https://doi.org/10.33592/dk.v9i2.1783>

¹⁰ Nur Nuzula, “Politik Elite Nahdatul Ulama(NU) :Pemihakan Dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) Tahun 2014” (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016).

dalam skala nasional (Pilpres 2014) maupun lokal (Pilkada Muaro Jambi 2024). Perbedaan antara dua skripsi ini terletak pada penelitian dari nur nuzula yang meneliti tentang Pilpres 2014 lebih fokus pada tingkat elite dan keputusan-keputusan strategis yang diambil oleh mereka. Sementara itu, penelitian ini menyelidiki dinamika yang lebih luas, termasuk bagaimana mobilisasi massa dilakukan di tingkat akar rumput dan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat

Selanjutnya adalah Penelitian Muazzin yang berjudul “Partisipasi Politik Tokoh Agama pada Pilkada Aceh Selatan Tahun 2018”.¹¹ Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dan membahas peran penting tokoh agama dalam membangun opini publik melalui media dakwah. Studi ini memiliki kesamaan dengan penelitian tentang mobilisasi massa NU dalam pemilihan DPRD Muaro Jambi, yaitu sama-sama menyoroti peran agama dalam mobilisasi partisipasi politik masyarakat. Meskipun bertujuan mengkaji pengaruh agama terhadap pilihan politik, keduanya memiliki perbedaan dalam unit analisis, konteks pilkada, dan strategi mobilisasi. Penelitian tentang tokoh agama di Aceh Selatan menunjukkan bagaimana individu agamawan membentuk opini publik, sedangkan studi tentang NU menyoroti peran organisasi keagamaan yang terstruktur dalam memobilisasi massa secara sistematis. Dengan demikian, kedua penelitian ini saling melengkapi dalam memahami hubungan kompleks antara agama dan politik dalam pemilihan umum di Indonesia.

¹¹ M Muazzin, “Partisipasi Politik Tokoh Agama Pada Pilkada Aceh Selatan Tahun 2018,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik* 7 (2022).

Terakhir Penelitian yang dilakukan oleh Achmad Wahyu Ilhami berjudul “Partisipasi Politik Muslimat Nahdlatul Ulama Cabang Kota Surabaya dalam Pemilihan Gubernur Jawa Timur Tahun 2018”¹². Mengkaji peran aktif Muslimat NU dalam Pilgub Jatim 2018. Fokusnya pada latar belakang, bentuk partisipasi politik, hubungan struktural dengan calon yang didukung, pengalaman politik calon, serta aktivitas kampanye yang dilakukan. Tujuan penelitian ini untuk memahami faktor-faktor yang mendorong partisipasi politik organisasi keagamaan. Persamaannya dengan studi tentang NU di Muaro Jambi terletak pada fokus keduanya terhadap partisipasi politik organisasi keagamaan dalam pemilu di Indonesia serta sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif.

Namun, perbedaannya terletak pada cakupan dan fokus. Ilhami meneliti Muslimat NU dalam Pilgub tingkat provinsi dengan menyoroti kampanye dan pendidikan politik, sementara penelitian di Muaro Jambi lebih luas mencakup peran NU secara keseluruhan dalam mobilisasi massa pada pemilihan DPRD tingkat kabupaten. Selain itu, perbedaan juga terlihat dari teori yang digunakan, periode pemilihan, serta bentuk partisipasi politik yang dipengaruhi oleh konteks sosial dan politik masing-masing wilayah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk memahami bagaimana pemanfaatan afiliasi politik calon legislatif terhadap NU dalam memobilisasi massa pemilih di Kabupaten Muaro Jambi sebagai pembeda dengan

¹² Achmad Wahyu, I. (2019). *Partisipasi politik muslimat Nahdlatul Ulama dalam pemilihan Gubenur Jawa Timur tahun 2018* (Doctoral dissertation, Wijaya Kusuma Surabaya University).

penelitian sebelumnya. Penelitian ini akan mengungkap strategi-strategi yang dilakukan kandidat, bentuk relasi yang terbangun antara politik dan organisasi keagamaan, serta dampaknya terhadap dinamika politik lokal. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis terhadap kajian politik lokal dan kultural, serta kontribusi praktis bagi aktor politik dalam memahami pentingnya afiliasi sosial-keagamaan dalam strategi politik elektoral. Terkait dengan dengan pemaparan latar belakang penelitian di atas, dalam hal ini penulis bermaksud ingin melakukan penelitian dengan judul **“PEMANFAATAN AFILIASI POLITIK CALON LEGISLATIF KABUPATEN MUARO JAMBI TERHADAP NAHDLATUL ULAMA DALAM MEMOBILISASI MASSA PEMILIH”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka peneliti hendak melakukan penelitian dengan memecahkan rumusan masalah sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana strategi yang diterapkan Calon Anggota Legislatif terpilih dalam memanfaatkan afiliasi politik NU untuk menggerakkan massa dalam mendukung mereka?
- 1.2.2 Bagaimana pola mobilisasi yang dilakukan oleh Caleg terhadap massa NU untuk memperoleh dukungan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan rumusan masalah yang telah ditentukan di atas maka penelitian ini dilakukan untuk memperoleh tujuan sebagai berikut:

1.3.1 Untuk menjelaskan strategi yang diterapkan Calon Anggota Legislatif terpilih dalam memanfaatkan afiliasi politik NU untuk menggerakkan massa dalam mendukung mereka.

1.3.2 Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana Calon Anggota Legislatif terpilih memanfaatkan mobilisasi masa NU dalam menentukan pilihan politik masyarakat di Kabupaten Muaro Jambi.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan menjadi sumber manfaat yang besar bagi pembaca dan perkembangan ilmu pengetahuan, oleh sebab itu diharapkan penelitian ini bermanfaat sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat memperkaya bahan ajar dalam pendidikan politik, sehingga generasi muda dapat memahami dinamika politik yang melibatkan agama secara lebih kritis. Pengembangan Teori Sosial-Politik dimana Penelitian ini memperkaya pemahaman tentang peran Nahdlatul Ulama (NU) dalam proses politik lokal. Dan dapat menjadi pengembangan Kajian Politik dan Agama dalam memberikan perspektif baru mengenai interaksi agama dan politik dalam pemilihan lokal.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan menjadi sebuah strategi Politik Lokal dalam menjadi referensi bagi politisi dalam merumuskan strategi melibatkan organisasi keagamaan dalam kampanye. Dan menjadi pembelajaran

dalam pengembangan pemahaman Masyarakat untuk Membantu masyarakat memahami pengaruh agama dalam keputusan politik, meningkatkan kesadaran kritis dalam pemilu.

1.5 Landasan Teori

1.5.1 Afiliasi Politik

Secara umum, afiliasi menggambarkan bentuk keterkaitan atau hubungan antara individu dengan suatu lembaga, kelompok, atau jaringan tertentu yang memiliki hubungan timbal balik, baik dalam bentuk kerja sama, hubungan kekerabatan, maupun bentuk keterikatan lainnya¹³. Dalam ranah politik, afiliasi merujuk pada hubungan kedekatan antara individu atau kelompok dengan partai politik, organisasi sosial, atau komunitas yang memiliki kesamaan pandangan ideologis, kepentingan bersama, ataupun tujuan politik tertentu. Hubungan ini dapat bersifat formal, seperti menjadi anggota resmi partai politik, maupun informal, seperti keterikatan emosional atau ideologis terhadap suatu entitas politik¹⁴.

Istilah politik afiliasi mengacu pada kondisi ketika individu atau kelompok menjalin hubungan politik yang didasari oleh kesamaan nilai, kepercayaan, atau strategi tertentu. Afiliasi semacam ini sering menjadi salah satu faktor utama dalam menentukan dukungan terhadap calon legislatif atau partai dalam pemilu,

¹³ Rinjani, H., & Firmanto, A. (2013). Kebutuhan afiliasi dengan intensitas mengakses facebook pada remaja. *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan*, 1(1), 76-85.

¹⁴ Shadiqin, S. I. (2021). Bertahan Dalam Perubahan: Modifikasi dan Afiliasi Politik Tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah di Aceh. *Jurnal Sosiologi Agama*, 15(1), 53-70.

karena jaringan yang terbentuk dari afiliasi tersebut dapat memperluas jangkauan mobilisasi dukungan politik secara signifikan. Dalam praktiknya, afiliasi politik dapat terlihat melalui dukungan organisasi keagamaan, kelompok etnis, atau komunitas sosial yang memiliki identitas dan aspirasi politik serupa.

Dalam konteks politik elektoral, afiliasi sering kali diposisikan sebagai modal sosial yang memperkuat kepercayaan publik terhadap kandidat. Misalnya, di lingkungan Nahdlatul Ulama (NU), organisasi sayap seperti Fatayat NU dapat menjadi saluran dukungan terhadap caleg perempuan yang dianggap merepresentasikan nilai-nilai ke-NU-an. Caleg yang memiliki kedekatan kultural atau struktural dengan organisasi massa semacam ini umumnya memperoleh keuntungan elektoral karena dianggap memiliki integritas dan visi yang sejalan dengan konstituen. Oleh sebab itu, politik afiliasi menjadi bagian dari strategi kemenangan yang mengandalkan kekuatan jaringan dan kepercayaan kolektif masyarakat.

1.5.2 Teori Mobilisasi Sumber Daya

Teori mobilisasi sumber daya pertama kali diperkenalkan oleh Anthony Oberschall, seorang sosiolog asal Amerika Serikat yang juga merupakan profesor emeritus di University of North Carolina at Chapel Hill. Dalam karya-karyanya seperti *Social Conflict and Social Movements*, *Social Movements: Ideologies, Interests, and Identities*, serta *Collective Behavior and Social Movements*¹⁵,

¹⁵ Sukmana, O. (2016). *Konsep dan Teori Gerakan Sosial*. Jakarta: Rosda

Oberschall menjelaskan bahwa mobilisasi sumber daya bukanlah proses yang terjadi secara spontan, melainkan melalui perencanaan dan struktur yang matang. Ia menekankan pentingnya peran organisasi, kepemimpinan, jaringan sosial, serta pengelolaan sumber daya dalam menggerakkan massa. Gagasannya ini menjadi bagian dari pendekatan *resource mobilization theory* atau teori mobilisasi sumber daya, yang kini menjadi salah satu teori utama dalam kajian gerakan sosial.

Mobilisasi massa sendiri diartikan sebagai upaya pengerahan atau pengumpulan orang dalam jumlah besar secara serentak untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan ini bisa bermacam-macam, mulai dari kampanye politik, aksi sosial, hingga gerakan perubahan. Esensi dari mobilisasi ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, mempengaruhi kebijakan publik, serta mendorong tindakan kolektif dalam menghadapi persoalan-persoalan bersama.

Adapun tujuan dari mobilisasi massa bisa beragam, tergantung pada konteksnya. Dalam dunia politik, mobilisasi massa bertujuan untuk meraih dukungan atau mendorong reformasi. Dalam bidang sosial, mobilisasi digunakan untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap isu-isu penting seperti kesetaraan, lingkungan, atau kemanusiaan. Sedangkan dalam konteks ekonomi, mobilisasi massa bisa digunakan untuk memperjuangkan hak pekerja atau menuntut kebijakan ekonomi yang lebih adil. Untuk mencapai tujuannya, mobilisasi massa dilakukan melalui berbagai metode. Beberapa di antaranya adalah kampanye, baik langsung maupun melalui media sosial, pertemuan atau

diskusi public, demonstrasi dan aksi solidaritas, serta kegiatan sosial yang melibatkan komunitas secara langsung. Metode-metode ini dipilih berdasarkan strategi, sasaran, dan karakteristik massa yang ingin digerakkan.

Dalam memahami fenomena pemanfaatan afiliasi Nahdlatul Ulama (NU) oleh para calon anggota legislatif pada Pemilihan Legislatif (Pileg) tahun 2024 di Kabupaten Muaro Jambi, penelitian ini menggunakan Teori Mobilisasi Massa yang dikemukakan oleh Anthony Oberschall. Teori ini menjelaskan bahwa keberhasilan suatu mobilisasi massa sangat bergantung pada sejumlah faktor yang saling berhubungan, di antaranya adalah sebagai berikut: ¹⁶

1) Organisasi

Organisasi menjadi fondasi dalam mobilisasi karena struktur yang tertata memungkinkan koordinasi dan pelaksanaan strategi kolektif Organisasi menjadi instrumen utama dalam mobilisasi karena menyediakan struktur, aturan, dan mekanisme koordinasi bagi anggota. Adanya organisasi memungkinkan tindakan kolektif berjalan secara sistematis, terarah, dan berkesinambungan. Organisasi juga berfungsi sebagai wadah yang mengatur pembagian peran, tanggung jawab, serta strategi mobilisasi.

¹⁶ Putri, T. A., Sekarningrum, B., & Fedryansyah, M. (2022). Gerakan Sosial dan Mobilisasi Sumber Daya dalam Memperjuangkan Pengakuan Kepercayaan Berbeda. *Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education*, 9(1), 22-31.

2) Jaringan Sosial

Jaringan sosial menjadi sarana penyebaran pengaruh dan informasi antaranggota. Jaringan sosial merupakan hubungan antarindividu maupun kelompok yang memungkinkan penyebaran informasi, ide, dan solidaritas dengan lebih cepat. Jaringan sosial memperkuat ikatan antaranggota dan menjadi jalur efektif dalam menggerakkan partisipasi. Semakin luas dan solid jaringan sosial, semakin besar pula potensi mobilisasi yang dapat dilakukan.

3) Kepemimpinan

Kepemimpinan menjadi unsur kunci dalam menggerakkan massa. Kepemimpinan berperan sebagai pengarah dan penggerak dalam mobilisasi massa. Seorang pemimpin memiliki kemampuan untuk membangun kepercayaan, memberikan legitimasi, serta menginspirasi anggota untuk bertindak. Kepemimpinan yang kuat mampu menciptakan visi bersama dan menjaga konsistensi arah gerakan.

4) Sumber Daya

Sumber daya, baik berupa dana, waktu, tenaga, hingga pengaruh sosial, menjadi instrumen penting dalam menjalankan mobilisasi. Mobilisasi memerlukan berbagai sumber daya, baik yang bersifat materiil maupun nonmateri. Sumber daya ini mencakup dana, tenaga, waktu, informasi, keterampilan, maupun fasilitas pendukung. Keberadaan dan ketersediaan sumber daya menjadi syarat penting dalam menjaga keberlangsungan mobilisasi.

5) Kesempatan Politik

Kesempatan politik merujuk pada situasi dan kondisi yang memungkinkan mobilisasi terjadi. Kesempatan politik merujuk pada kondisi eksternal yang dapat mendukung atau menghambat mobilisasi massa. Situasi politik yang terbuka, lemahnya oposisi, atau adanya krisis tertentu sering kali menjadi peluang bagi kelompok untuk memaksimalkan mobilisasi. Indikator ini menekankan pentingnya membaca dinamika lingkungan politik sebagai strategi mobilisasi.

6) Komunikasi

Menjadi medium yang menghubungkan antar anggota dengan kata lain. Komunikasi merupakan media untuk menyampaikan pesan, menyebarkan informasi, dan memotivasi anggota agar terlibat dalam mobilisasi. Komunikasi dapat dilakukan melalui berbagai saluran, baik langsung maupun tidak langsung, yang berfungsi memperkuat koordinasi dan memperluas jangkauan partisipasi.

7) Identitas Kolektif

Identitas kolektif menjadi kekuatan simbolik yang menyatukan gerakan, dengan rasa kebersamaan yang tumbuh dari nilai, keyakinan, tujuan, atau pengalaman bersama. Identitas ini memberikan dasar solidaritas dan loyalitas, sehingga anggota merasa menjadi bagian dari suatu gerakan. Identitas kolektif memperkuat motivasi individu untuk berkontribusi dalam mobilisasi massa.

Dengan mengacu pada teori mobilisasi massa ini, penelitian akan menganalisis bagaimana para caleg memanfaatkan setiap elemen tersebut dalam proses kampanye dan perebutan suara, serta bagaimana jaringan keagamaan seperti NU dapat bertransformasi menjadi kekuatan politik yang efektif dalam kontestasi elektoral. Berdasarkan konteks penelitian terdapat empat indikator paling dominan dan relevan untuk menganalisis penelitian ini dari Teori Mobilisasi Massa Anthony Oberschall untuk mengukur dan menelaah fenomena ini adalah:

1) Organisasi

NU adalah organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, dengan struktur formal yang menjangkau hingga tingkat desa (ranting). Struktur ini menjadi instrumen utama dalam memobilisasi dukungan politik, karena melalui MWC NU, banom (seperti Ansor, Muslimat, IPNU-IPPNU), hingga pesantren dan majelis taklim, komunikasi dan koordinasi politik dapat berjalan secara sistematis. Dalam konteks ini, caleg yang terafiliasi dengan NU sangat mungkin mengakses dan memanfaatkan jalur organisasi ini untuk menjangkau konstituen.

2) Jaringan Sosial

Jaringan sosial di lingkungan NU bukan hanya bersifat formal, tetapi juga sangat kultural dan berbasis kekeluargaan. Koneksi personal antar warga Nahdliyin, antara santri dan kiai, serta antar komunitas keagamaan menjadi kekuatan dalam menyebarkan informasi dan membangun dukungan. Caleg

yang menjadi bagian dari jaringan ini lebih mudah diterima dan dipercaya, karena mereka “satu barisan” secara sosial dan ideologis dengan pemilihnya.

3) Kepemimpinan

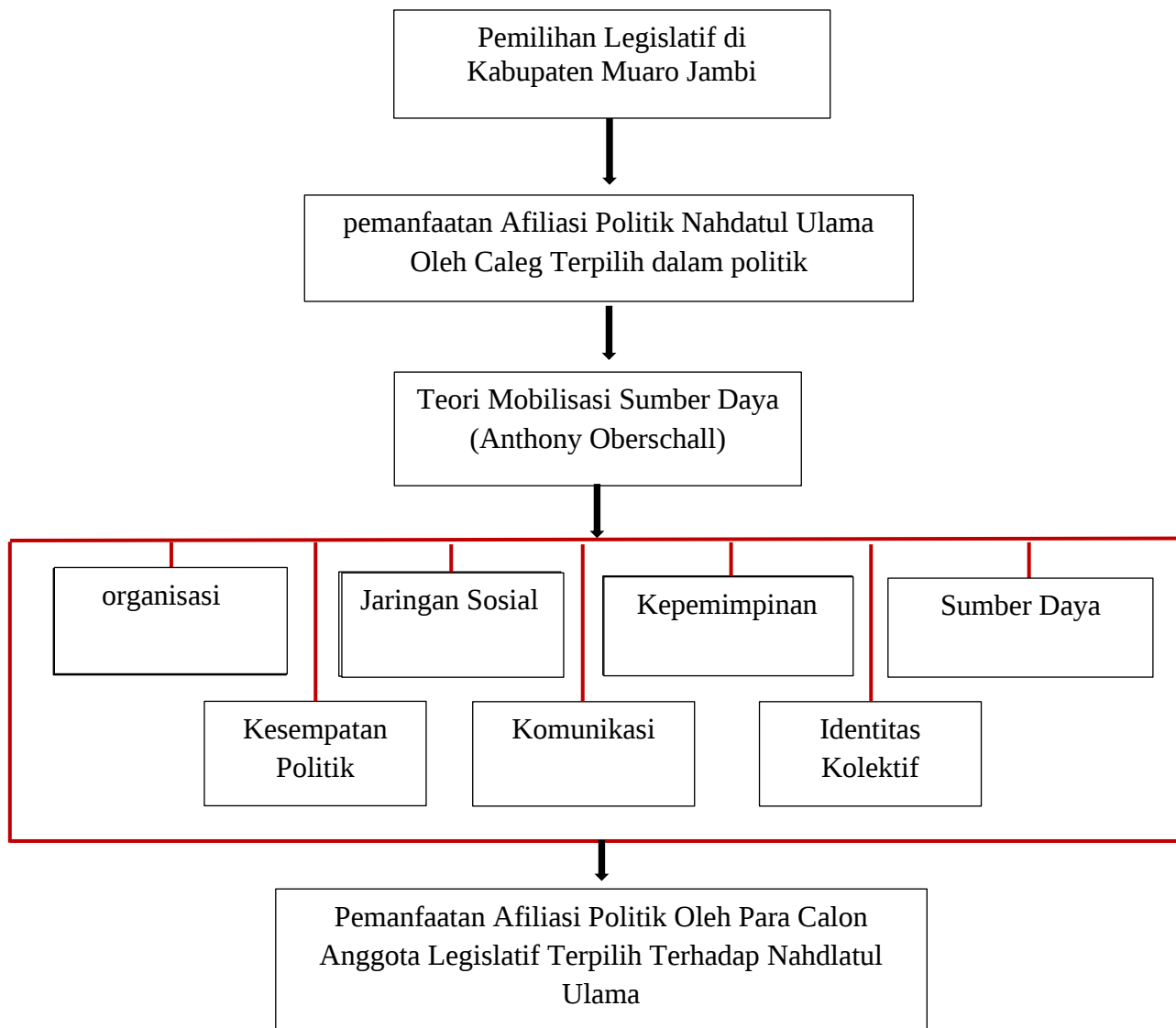
Figur ulama, kiai, dan tokoh NU sangat berpengaruh dalam membentuk arah pilihan politik warga. Legitimasinya tidak hanya berdasarkan struktur formal, tapi juga spiritual. Dukungan dari seorang kiai atau tokoh NU kepada seorang caleg seringkali dianggap sebagai restu keagamaan, bukan sekadar pilihan politik biasa. Oleh karena itu, kepemimpinan tokoh NU menjadi penentu penting dalam keberhasilan mobilisasi massa dalam Pileg.

4) Identitas Kolektif

Identitas sebagai warga Nahdliyin sangat kuat di Muaro Jambi, terutama karena mayoritas masyarakat berafiliasi kultural dan spiritual dengan NU. Identitas ini berperan sebagai pemersatu dan pembentuk loyalitas politik. Ketika seorang caleg mengklaim diri sebagai bagian dari NU atau menunjukkan kedekatan dengan nilai-nilai NU, hal itu menumbuhkan rasa kebersamaan dan memperkuat ikatan emosional dengan pemilih. Ini menjadi strategi yang sangat efektif dalam menarik suara.

Keempat indikator ini sangat relevan digunakan sebagai alat analisis utama karena mencerminkan realitas sosial-politik masyarakat Muaro Jambi, di mana keberadaan NU bukan sekadar entitas keagamaan, tetapi juga kekuatan sosial yang bisa dimobilisasi dalam kontestasi politik.

1.6 Kerangka Pikir



Alur konseptual kerangka pikir di atas menjelaskan arah dan fokus analisis terhadap fenomena keterlibatan serta pemanfaatan afiliasi politik NU dalam Pemilihan Legislatif 2024 di Kabupaten Muaro Jambi. Penelitian ini diawali dengan mengidentifikasi bagaimana keterlibatan NU sebagai organisasi keagamaan terbesar di Indonesia dimanfaatkan oleh para calon anggota legislatif dalam proses politik elektoral di wilayah mayoritas warga Nahdliyin. Untuk menganalisis hal tersebut, digunakan pendekatan **Teori Mobilisasi sumber daya** dari Anthony Oberschall, yang menekankan bahwa keberhasilan mobilisasi dipengaruhi oleh sejumlah faktor penting.

Dari tujuh indikator yang ditawarkan oleh teori tersebut, penelitian ini secara khusus memfokuskan pada empat elemen utama yang paling relevan, yaitu **organisasi, jaringan sosial, kepemimpinan, dan identitas kolektif**. Keempat indikator ini dijadikan sebagai alat analisis untuk menelaah bagaimana para caleg terpilih memanfaatkan struktur NU, jaringan komunitasnya, peran tokoh karismatik, serta sentimen identitas keagamaan dalam membangun dukungan politik. Dengan demikian, kerangka pikir ini mengarahkan penelitian untuk memahami strategi pemanfaatan afiliasi politik NU secara lebih sistematis dalam konteks kemenangan elektoral para caleg di Kabupaten Muaro Jambi.

1.7 Metodologi Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, sesuai dengan permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya. Pendekatan kualitatif menitikberatkan pada proses dan makna yang belum

dianalisis secara ketat atau diukur dari segi kualitas, jumlah, intensitas, atau frekuensi¹⁷. Metode kualitatif ini bertujuan untuk memahami fenomena sosial dan permasalahan manusia secara mendalam¹⁸. Fenomena sosial yang akan diteliti adalah strategi mobilisasi massa oleh NU. Penelitian ini menggunakan wawancara tipe open-ended, di mana peneliti mengajukan pertanyaan mengenai fakta dan opini informan terkait peristiwa yang diteliti. Jenis wawancara ini umum dalam penelitian kualitatif dan menggunakan teknik tidak terstruktur, yang fleksibel tanpa daftar pertanyaan kaku, namun dapat dikembangkan menjadi wawancara terstruktur.

1.7.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah menganalisis bagaimana para calon anggota legislatif terpilih pada Pemilihan Legislatif Tahun 2024 di Kabupaten Muaro Jambi memanfaatkan afiliasi politik dengan Nahdlatul Ulama (NU) sebagai strategi mobilisasi dukungan politik. Penelitian ini menelaah peran NU tidak hanya sebagai organisasi keagamaan, tetapi juga sebagai kekuatan sosial-politik yang dapat dimanfaatkan oleh para caleg melalui struktur organisasi, jaringan sosial warga Nahdliyin, pengaruh kepemimpinan tokoh NU, serta identitas kolektif keagamaan masyarakat. Dengan menggunakan Teori Mobilisasi Massa

¹⁷ Rainbow Tin Hung Ho, Siu Man Ng, and David Yau Fai Ho, "The Sage Handbook of Qualitative Research," *Asian Journal Of Social Psychology* 10, no. 4 (2007): 277–79, <https://doi.org/10.1111/j.1467-839x.2007.00237.x>.

¹⁸ Mulyana, A., dkk. (2024). *Metode Penelitian Kualitatif*. Kabupaten Bandung: Penerbit Widina. Hlm. 11.

Anthony Oberschall, penelitian ini berfokus pada empat indikator dominan organisasi, jaringan sosial, kepemimpinan, dan identitas kolektif untuk mengkaji sejauh mana afiliasi politik dengan NU berkontribusi terhadap keberhasilan elektoral para caleg terpilih di daerah mayoritas Nahdliyin tersebut.

1.7.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di kantor PCNU yang terletak di Muaro Jambi. Pemilihan lokasi ini dilakukan secara sengaja karena kantor PCNU Provinsi Jambi memiliki peran penting sebagai pusat organisasi Nahdlatul Ulama (NU) yang mengurus wilayah Muaro Jambi. Lokasi ini dianggap relevan dengan tujuan penelitian karena PCNU merupakan lembaga yang berperan aktif dalam berbagai kegiatan keagamaan dan sosial di wilayah tersebut, sehingga dapat memberikan data yang sesuai dengan fokus penelitian.

1.7.4 Sumber data

Sumber data memberikan penjelasan mengenai jenis data yang digunakan dalam penelitian. Oleh karena itu, sumber data penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu:

a) Data primer

Data primer merupakan sumber informasi yang didapatkan secara langsung oleh peneliti. Data ini dikumpulkan langsung dari subjek atau informan yang memiliki pemahaman mendalam dan detail mengenai isu

yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini, sumber data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara¹⁹.

b) Data sekunder

Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti, misalnya melalui pihak lain atau melalui dokumen. Data sekunder ini berfungsi sebagai pendukung data primer dan dapat diperoleh dari buku, jurnal, dokumen, laporan, dan sumber-sumber lain yang relevan²⁰.

1.7.5 Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan adalah metode yang digunakan dalam penelitian kualitatif untuk memilih siapa yang akan menjadi sumber data. Penelitian kualitatif tidak menggunakan konsep sampel seperti dalam penelitian kuantitatif, sehingga informan dipilih berdasarkan keterlibatan mereka dengan objek penelitian yang sedang diteliti. Dengan demikian, informan dipilih berdasarkan relevansi mereka dengan topik yang akan diteliti, bukan secara acak.

Dalam penelitian ini, proses pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, yaitu metode pemilihan informan berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria yang digunakan adalah memilih pihak-pihak yang memahami peran Nahdlatul Ulama dalam Pileg, serta strategi yang digunakan NU untuk

¹⁹ Priadana, M. S., & Sunarsi, D. (2021). Metode Penelitian Kuantitatif. Tangerang Selatan: Pascal Books. Hlm. 55

²⁰ Yuliani, W., & Supriatna, E. (2023). Metode penelitian bagi pemula. Bandung: Penerbit Widina. Hlm 31.

memobilisasi massa dalam pemilihan tersebut. Berdasarkan hal tersebut, maka informan dalam penelitian ini sebagai berikut.

Tabel. 3
Daftar Informan

No	Informan	Alasan
1	Ketua PC NU Kab. Muaro Jambi	Merupakan figur sentral yang memahami peran organisasi NU secara struktural dan strategis dalam dinamika sosial-politik lokal. Sebagai pemimpin tertinggi NU di tingkat kabupaten, Ketua PCNU memiliki otoritas, informasi, dan pengaruh dalam pengambilan keputusan keorganisasian serta hubungan dengan aktor politik yang mengatasnamakan NU.
2	Tokoh Ulama NU	Dipilih sebagai pemimpin kultural dan spiritual yang memiliki legitimasi tinggi di tengah masyarakat Nahdliyin. Pandangan mereka sangat penting dalam memahami bagaimana dukungan politik diarahkan, serta bagaimana nilai-nilai keagamaan dan identitas kolektif dibangun dan dimobilisasi untuk kepentingan elektoral.
3	Anggota DPRD Terpilih dari NU	Informan kunci karena secara langsung mewakili kelompok yang berhasil dalam kontestasi politik dengan memanfaatkan afiliasi NU. Wawancara dengan mereka memberikan data penting terkait strategi mobilisasi, bentuk komunikasi politik yang digunakan, serta manfaat yang diperoleh dari jaringan dan simbol-simbol NU.
4	Caleg Tidak Terpilih yang Bukan NU	Menjadi informan pembanding untuk memahami bagaimana caleg di luar lingkungan NU mengalami kesulitan atau tantangan dalam bersaing dengan kandidat yang memiliki afiliasi dengan NU. Perspektif ini penting untuk melihat pengaruh kekuatan afiliasi NU dari sudut pandang eksternal.

5	Masyarakat Kabupaten Muaro Jambi (Warga Nahdliyin)	Subjek utama yang menjadi sasaran mobilisasi politik. Pandangan warga Nahdliyin akan mencerminkan sejauh mana mereka merasa terhubung secara emosional, ideologis, atau struktural dengan calon legislatif yang berafiliasi dengan NU, sekaligus menilai efektivitas strategi mobilisasi dari sisi penerima pesan.
---	--	--

Sumber: Olahan Penelitian, 2025.

1.7.6 Teknik Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data, peneliti dapat menerapkan berbagai metode, antara lain wawancara, observasi, dan kajian pustaka/dokumen. Ketiga metode tersebut sangat krusial untuk menggali informasi secara mendalam dan memperoleh data yang valid, yang nantinya akan digunakan sebagai dasar bukti dalam penelitian. Berikut adalah pernyataan mengenai teknik pengumpulan data yang akan diterapkan oleh peneliti²¹.

a) Oservasi

Observasi merupakan metode pengamatan fenomena di lapangan melalui panca indera (penglihatan, sentuhan, pendengaran, penciuman, dan perasa). Peneliti sering menggunakan alat bantu untuk merekam informasi secara ilmiah sesuai dengan tujuan dan pertanyaan riset. Melalui observasi, peneliti dapat mempelajari perilaku serta makna di balik tindakan tersebut

b) Wawancara

²¹ Jonathan Sarwono, (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu. Hlm. 209

Wawancara adalah pertemuan antara dua individu yang bertujuan untuk bertukar informasi dan gagasan melalui proses tanya jawab. Metode ini membantu peneliti memahami lebih dalam tentang sudut pandang partisipan terkait situasi dan fenomena yang sedang diteliti, yang mungkin tidak bisa diperoleh melalui pengamatan langsung.

c) Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data kualitatif yang mencakup berbagai fakta dan informasi yang tersimpan dalam bentuk dokumen. Dokumen bisa berupa autobiografi, surat pribadi, buku catatan, kliping, dokumen pemerintah atau swasta, serta data digital. Dalam penelitian ini, dokumentasi yang dimaksud meliputi foto, daftar hadir, laporan kegiatan, dan dokumen lainnya

1.7.7 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan selama proses pengumpulan data dan setelah selesai. Penelitian ini menerapkan tiga tahapan analisis data, seperti yang diuraikan dalam model Milies dan Huberman.

a) Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang komprehensif, penelitian ini mengadopsi pendekatan multi-metode. Wawancara mendalam dilakukan dengan berbagai tokoh kunci, mulai dari tokoh NU, pengurus partai politik, hingga tokoh masyarakat dan pemilih. Selain itu, observasi partisipatif dilakukan untuk mengamati secara langsung dinamika politik dan agama

dalam kegiatan kampanye dan interaksi sosial. Dokumentasi juga menjadi bagian penting dalam penelitian ini, dengan mengumpulkan berbagai jenis dokumen seperti sertifikat acara, poster kampanye, dan konten media sosial yang relevan.

b) Reduksi Data

Reduksi data adalah proses penyederhanaan dan penyaringan data mentah dari pengumpulan data seperti wawancara, observasi, atau dokumen, untuk memusatkan perhatian pada data yang relevan dan mendukung tujuan penelitian. Proses ini mencakup pemilihan data penting, pengabstrakan, dan transformasi data menjadi informasi yang lebih terstruktur. Dalam penelitian tentang dinamika hubungan politik dan agama, seperti kasus mobilisasi massa pada pemilihan DPRD Muaro Jambi, reduksi data membantu peneliti menyoroti informasi terkait pola mobilisasi massa serta hubungan antara politik dan agama yang memengaruhi hasil pemilihan. Dengan reduksi data, peneliti dapat menjaga fokus penelitian pada poin-poin utama yang mendukung tujuan penelitian.

c) Penyajian Data

Setelah data direduksi, hasil analisis disajikan dalam berbagai bentuk. Narasi digunakan untuk menggambarkan secara rinci dinamika hubungan politik dan agama dalam proses mobilisasi massa. Diagram, seperti diagram alur dan diagram Venn, digunakan untuk menyajikan informasi secara visual dan memudahkan pemahaman. Selain itu, matriks

juga digunakan untuk membandingkan strategi mobilisasi yang digunakan oleh berbagai kelompok.

1.7.8 Keabsahan Data (Triangulasi Data)

Triangulasi merupakan pendekatan dalam penelitian kualitatif yang menggunakan kombinasi lebih dari satu strategi guna memperoleh data atau informasi secara lebih komprehensif dan valid. Teknik ini bertujuan untuk meningkatkan kredibilitas hasil penelitian melalui perbandingan dan verifikasi data dari berbagai sudut pandang. Dalam pelaksanaannya, terdapat empat jenis triangulasi yang umum digunakan, yaitu:

a) Triangulasi Kejujuran Peneliti

Jenis triangulasi ini bertujuan untuk menguji integritas, objektivitas, serta kemampuan peneliti dalam merekam data di lapangan. Proses ini dilakukan dengan melibatkan peneliti lain untuk melakukan pemeriksaan silang, termasuk wawancara ulang dan pengumpulan data yang serupa di lokasi yang sama. Langkah ini merupakan bentuk verifikasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti utama.

b) Triangulasi dengan Sumber Data

Triangulasi ini dilakukan dengan membandingkan dan memeriksa validitas informasi yang diperoleh dari berbagai sumber, waktu, dan teknik pengumpulan data yang berbeda. Proses ini melibatkan konfirmasi dari responden, koreksi atas kekeliruan data oleh sumber, penyediaan informasi tambahan secara sukarela, serta penetapan informan dalam konteks

penelitian. Selain itu, triangulasi ini memberikan kesempatan untuk membuat ringkasan awal sebagai bagian dari proses analisis guna menilai kelengkapan data yang dikumpulkan.

c) Triangulasi dengan Metode

Pada triangulasi jenis ini, peneliti melakukan pengecekan terhadap konsistensi hasil yang diperoleh dari berbagai metode pengumpulan data, seperti wawancara dan observasi. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah informasi yang dikumpulkan melalui wawancara sejalan dengan hasil observasi di lapangan, serta memastikan apakah sumber data memberikan informasi yang serupa ketika diobservasi dan diwawancarai.

d) Triangulasi dengan Teori

Triangulasi ini dilandasi oleh asumsi bahwa fakta tidak dapat diuji hanya melalui satu pendekatan teoretis saja. Oleh karena itu, diperlukan perbandingan dengan teori lain atau penggunaan pendekatan teoretis yang beragam dalam menganalisis data. Langkah ini bertujuan untuk memperluas perspektif analisis dan menghasilkan temuan penelitian yang lebih relevan dan mendalam.